

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”**

Pada Tahun 2021 kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Blora mengalami pergantian dengan dilantiknya Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak pada tanggal 26 Februari 2021, sehingga agenda pembangunan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan juga menjadi agenda pembangunan Tahun 2021. Indikator – indikator makro yang merupakan indikator kinerja pembangunan daerah masih mengacu pada target RPJMD Tahun 2016-2021, Indikator tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel IV-1**  
**Indikator Kinerja pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 dan Perubahan Target Tahun 2021 Akibat Pandemi Covid-19**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021 ( RPJMD 2016-2021)	Target RKPD 2021	Proyeksi Perubahan Target Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4-5,7	2-3	1-1,5
2.	Inflasi	%	3-7	2,5-6	2-7
3.	Indeks Gini	Skala	0,37	0,38	0,39
4.	Persentase penduduk miskin	%	9-10	12-14	11-12
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,84	68,84	68,84
6.	Angka Usia Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,84	12,65
7.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,6	6,6	6,4
8.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75	74	72
9.	Pengeluaran Riil Per kapita	Ribu Rp	9.485	9.485	9.485
10.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,4	6-7	5-6
11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	82,77	83,43	83,21
12.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	68,84	68,84	68,34
13.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	%	16,94	16,94	16,94
14.	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	57,6	57,6	57,6
15.	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100	100	100
16.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	B

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021 (RPJMD 2016-2021)	Target RKPDP 2021	Proyeksi Perubahan Target Tahun 2021
17.	Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik"	%	100	100	100
18.	Rasio penduduk berKTP	%	100	100	100
19.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99	99	99
20.	Persentase Keterisian data SIPD	%	90	90	90
21.	Tersedianya tanah untuk keperluan Pemerintah daerah	%	100	100	100
22.	Persentase jenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
23.	Prosentase dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik	%	178.000	178.000	178.000
24.	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	20	20	20
25.	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7	7	7
26.	Persentase Raperda masuk Prolegda (Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan	%	80	80	80
27.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status	WTP	WTP	WTP
28.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	%	6,11	6,11	6,11
29.	Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
30.	Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
31.	Jumlah Industri	unit	11.850	11.850	11.850
32.	Persentase koperasi sehat	%	37	37	37
33.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	unit	6.825	6.825	6.000*)
34.	Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	US \$	2.942.679	2.942.679	2.942.679
35.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	100	100	100
36.	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	300.000	300.000	200.000*)
37.	Produktivitas Pangan Utama (Padi Sawah)	Ton/ha	51,97	51,97	51,97
38.	Produksi Padi sawah	ton	420.295	420.295	420.295
39.	Produksi Padi ladang	ton	36.373	36.373	36.373
40.	Produksi Jagung	ton	276.705	276.705	276.705
41.	Populasi Sapi Potong	ekor	278.397	267.690	267.690
42.	Produksi Perikanan	Kg	450	450	450
43.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67,6	67,6	67,6
44.	Standart IKLH Kabupaten Blora	%	70,42	70,42	70,42
45.	Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100
46.	Persentase sampah yang terangkut	%	95,24	95,24	95,24
47.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	5	5	4*)
48.	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	Hari	100	100	100
49.	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	80	80	75*)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021 (RPJMD 2016-2021)	Target RKPDP 2021	Proyeksi Perubahan Target Tahun 2021
50.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100
51.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100
52.	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	167.823	167.823	167.073
53.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	8,5	8,5	11
54.	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	9,5	9,5	12,5
55.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	9	9	12
56.	Presentase Gizi Buruk	%	0.04	0.04	0,10
57.	Status Akreditasi RSUD Blora versi KARS	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna
58.	Status Akreditasi RSUD Cepu versi KARS	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna
59.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	5,2	5,2	5,2
60.	Persentase penurunan Jumlah PMKS	%	0,1	0,1	0,1
61.	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,12	0,12	0,12
62.	Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik.	%	75	75	75
63.	Prosentase jumlah BUMDes	%	45	45	45
64.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100
65.	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Medali	92	92	92
66.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	37,5	37,5	37,5
67.	Cakupan kelompok seni yang dibina	%	65	65	65
68.	Persentase Jalan kondisi baik	%	65	65	40*)
69.	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	81	81	81
70.	Panjang salurah drainase dalam kondisi baik	Km	230.4	230.4	230.4
71.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	50.03	50.03	50.03
72.	Perda RDTR yang ditetapkan	dokumen	1	1	1
73.	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	98	98	98
74.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kota	%	98	98	98
75.	Luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan	Ha	42	42	42
76.	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	65.847	65.847	65.847
77.	Cakupan pelayanan air minum	%	73,55	73,55	73,55
78.	Cakupan pelayanan sanitasi	%	0,08	0,08	0,08
79.	Presentase Capaian Indikator Kinerja RPJMD	%	92	92	92
80.	Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPDP	%	85	85	85
81.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDA	%	100	100	100
82.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	%	85	85	85

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021 ( RPJMD 2016-2021)	Target RKPD 2021	Proyeksi Perubahan Target Tahun 2021
83.	Cakupan Penegakan Perda	%	100	100	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Blora 2021, Proyeksi Bappeda

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Penyusunan RKPD Kabupaten Blora perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia.

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana sasaran pembangunan jangka menengah pada Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Memperhatikan arahan Presiden RI sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan Akhir RPJMN 2020-2024, pembangunan nasional diarahkan pada 5 (lima) fokus yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Fokus pembangunan tersebut diarahkan pada pencapaian Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 juga telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah

ditampung dalam 7 agenda pembangunan yang juga merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2022 antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Wilayah
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Keseluruhan agenda tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran makro pembangunan nasional tahun 2021 yang mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19 dari target RPJMN tahun 2021, yaitu : 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5-5,5% (dari target RPJMN sebesar 5,4-5,7%); 2. Persentase Penduduk Miskin 9,2-9,7% (dari target RPJMN sebesar 8,0- 8,5%); 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5-8,2% (dari target RPJMN sebesar 4,8-5,0%); 4. Indeks Gini sebesar 0,377-0,379 (dari target RPJMN sebesar 0,375- 0,379); dan 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78-72,79 (dari target RPJMN sebesar 73,26).

Beberapa Major Project yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Telaah Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Kabupaten Blora dalam Perpres ini ditempatkan sebagai ‘kawasan pendukung’ sebagai bagian dari Kawasan Rembang-Blora. Perpres ini utamanya mempercepat dan mengembangkan 3 kawasan utama di Jawa Tengah sesuai judul perpres (karena keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional di 3 kawasan tersebut). Rencana Induk Tahun 2020-2024 dalam Lampiran Perpres ini disiapkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan proyek dalam Rencana Induk ini yang berlokasi di Kabupaten Blora:

1. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko;
2. Pembangunan Embung Karangjati;
3. Peningkatan Jalan Rembang-Blora-Cepu;
4. Peningkatan Jalan Randublatung-Getas;
5. Pengembangan Bandara Ngloram

Dalam pencapaian proyek strategis tersebut Pemerintah Kabupaten Blora pada Tahun 2021 telah mempersiapkan kegiatan yang mendukung sesuai kewenangan antara lain dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan agenda pembangunan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, pembangunan sarana dan prasarana pendukung proyek strategis tersebut.

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan visi pembangunan ditujukan untuk “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia” dengan adanya bencana non alam pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah menjadi “ Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di dukung Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemulihan dan Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah yang berdaya saing.
4. Penguatan ketahanan bencana.
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondutivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fokus pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021, yaitu:

1. Pemulihan dan penguatan sektor perekonomian berdampak  
Dengan menitik beratkan pada penguatan sektor pertanian dan perikanan termasuk asuransi tani dan nelayan, penguatan cadangan lumbung pangan, penguatan IKM dan UMKM, termasuk subsidi bunga kredit, peningkatan sektor pariwisata dan investasi, infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas dan pengembangan transportasi publik.
2. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran termasuk kelompok miskin baru.  
Peningkatan program dan kegiatan berupa pelayanan dasar untuk mengurangi beban pengeluaran termasuk akses pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur perumahan dan pemukiman, akses pangan akses rumah dan akses administrasi kependudukan dan keluarga berencana. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat berupa peningkatan kompetensi tenaga kerja, strat up peningkatan kegiatan padat karya produktif serta penguatan BUMDes di desa dan penguatan database kemiskinan.
3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia  
Jumlah angkatan kerja Jawa Tengah 18,26 juta orang pada Agustus 2019 atau sebesar 52,94 % dari jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 34,49 Juta. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah sudah memasuki era bonus demografi dengan perubahan struktur demografi dimana usia produktif lebih besar dari usia non produktif. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila kualitas SDM tidak dapat terserap dalam lapangan kerja dan kompetensinya tidak sesuai untuk memasuki lapangan kerja.  
Kualitas pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat menjadi isu penting dan strategis untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Jawa Tengah. Secara agregat, hal ini ditunjukkan oleh perbaikan capaian IPM. Isu utama dalam bidang pendidikan di Jawa Tengah

diantaranya adalah akses layanan pendidikan untuk semua, mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta pemerataan dan kualitas pendidik yang belum sesuai dengan perubahan dinamika perilaku lapangan kerja di era milenial dan revolusi industri 4.0. Isu yang tidak kalah penting terkait kualitas SDM adalah semakin lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai "ke-Bhineka Tunggal Ika-an" dan nasionalisme serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusivitas wilayah di Jawa Tengah.

Sementara di bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan termasuk bagi masyarakat miskin, perbaikan kesehatan ibu-bayi-anak, *stunting* / penyakit menular dan tidak menular serta masih rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Adapun dari sisi pendapatan dihadapkan pada permasalahan terkait rendahnya *entrepreneurship* serta terbatasnya daya saing dan inovasi.

#### 4. Ketahanan Bencana

Dalam mengantisipasi bencana yang terjadi Jawa Tengah baik berupa bencana alam maupun non alam perlu adanya sebuah terobosan berupa upaya yang bisa meminimalisir dampak bencana berupa kegiatan mitigasi, respon darurat, penguatan sistem logistik, adaptasi masyarakat "new normal" pasca pandemi covid 19 dan pembentukan desa tangguh bencana.

#### 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas di jajaran pemerintahan Provinsi: dan Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, permasalahan yang perlu diperhatikan diantaranya belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen sumber daya aparatur belum berfokus pada standar kompetensi, pelayanan publik yang belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya pengelolaan sistem penanganan gratifikasi dan penataan kelembagaan sesuai kewenangan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien. Kegiatan untuk peningkatan tata kelola pemerintah yang baik berupa *direct service*, *open government*, *pengendalian internal*.

#### 6. Program Unggulan dan Strategi RPJMD diutamakan pada sinergi dan upaya pemulihan pasca covid 19



Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan untuk " *Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di dukung Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia*", dengan prioritas:

1. Peningkatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dengan fokus pada :
  - a. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan serta kualitas produk pertanian;
  - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan
  - c. Penguatan ketersediaan pangan
  - d. Peningkatan produksi dan produktifitas usaha dan industri kecil dan menengah;
  - e. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif
  - f. Penguatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa serta konektivitas antar wilayah;
  - g. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup;
  - h. Peningkatan pariwisata daerah;
  - i. Memacu ekspor dan impor;
  - j. Menjaga inflasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran, dengan fokus pada:
  - a. Pengurangan Kemiskinan:
    - 1) Penyediaan layanan dasar (*basic life access*) antara lain melalui pemberian akses pendidikan (peningkatan efektifitas Beasiswa Siswa Miskin, peningkatan kualitas lulusan 3 SMK Negeri Boarding School dan 15 asrama SMK Semi Boarding School); akses kesehatan (pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota, stimulan jamban sehat); akses infrastruktur dasar pemukiman (stimulan peningkatan kualitas rumah sederhana layak huni, stimulan pembangunan baru rumah sederhana layak huni dan penyiapan rusunawa serta perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh dan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin, air bersih dan sanitasi) dengan meningkatkan sinkronisasi penanganan dan perluasan keikutsertaan stakeholders, kemudahan akses kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi

masyarakat kurang mampu yang mengarah pada upaya validasi perbaikan data penduduk miskin; penanganan PMKS dalam panti dan peran serta masyarakat agar PMKS memiliki kapasitas kemandirian, pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera; serta perluasan pendampingan desa miskin;

- 2) Penguatan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) melalui fasilitasi untuk peningkatan dan perluasan akses modal yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas manajemen dan perluasan akses pasar, pengembangan kapasitas dan kualitas *start up* wirausaha baru yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin;
- 3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan membentuk Satgas Kemiskinan sampai tingkat Desa/Kelurahan, fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih valid serta peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Baznas.

b. Menurunkan angka pengangguran:

- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar kerja, pengembangan dan penguatan BLK yang sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan komitmen dunia usaha dalam pelatihan keterampilan yang berbasis *Link and Match* melalui penyelarasan kurikulum Sekolah Menengah dengan Industri Dunia Usaha / Dunia Industri (DU / DI) serta penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih;
- 2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya dan pelibatan yang lebih luas UMKM Jawa Tengah dalam *supply chain* industri di Jawa Tengah serta membuka akses pasar tenaga kerja bagi pencari kerja milenial.

3. Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah menuju SOM Jawa Tengah Yang Berdaya Saing, fokus pada:
  - a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui : alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA, SMK, SLB Negeri untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah dan mewujudkan sekolah gratis; Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTI dan PTI) SMA, SMK, SLB Negeri dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya; Pemenuhan akses inklusi siswa berkebutuhan khusus; Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana SMA, SMK, SLB Negeri bertahap sesuai kemendesakannya dan pemenuhan SPM; Perkuatan pendidikan karakter; Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui pemanfaatan ruang bersama; Pemberian bantuan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kriteria akreditasi sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SMA, SMK, SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, Bantuan bagi pendidik dan sarana prasarana keagamaan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kualitas toleransi antar umat beragama, serta bantuan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan menengah dan dasar.
  - b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dalam mengurangi kesakitan dan kematian sebagai implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui: Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan *stunting*, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, mengarah pada kemandirian BLUD RSUD / RSJD dan sumber pendanaan kreatif lainnya; Peningkatan sarana prasarana olah raga; Pelayanan KB bagi pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kategori 1.
  - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan melalui: Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; peningkatan kualitas keluarga; serta Pencegahan *trafficking*.

- d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan serta pelayanan bagi kelompok disabilitas dan lansia produktif-non produktif;
  - e. Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan melalui penyusunan kebijakan pembangunan kualitas kependudukan.
4. Penguatan Ketahanan Bencana
- a. Dalam menghadapi pandemi covid 19 dalam era new normal perlu adanya mitigasi bencana di daerah. Mitigasi bencana adalah penguatan sistem informasi kebencanaan rencana kontingensi mitigasi bencana wilayah KSP Borobudur, KEK Brebes, Penerapan pendidikan aman bencana, pengembangan desa tangguh bencana dan EWS. Dalam menghadapi bencana perlu adanya respon darurat penanganan bencana berupa posko terpadu penanganan bencana, dan pemasangan rambu jalur evakuasi, Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana, peningkatan sarana prasarana penanganan bencana dan pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah, fokus pada:
- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) yang terintegrasi dengan peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).
  - b. Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif; Meningkatkan kemandirian fiskal keuangan daerah dan mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non pemerintah untuk investasi pembangunan (pembiayaan kreatif, kerjasama dengan swasta, TJSLP dan atau Lembaga lainnya); Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah; Penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); Perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, pengendalian dan penegakan produk hukum serta peningkatan koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dalam penanganan permasalahan dengan Aparat Pengawas Eksternal.

- c. Perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif dan akuntabel; Penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu berbasis kinerja serta perbaikan -tunjangan kinerja daerah.
- d. Peningkatan edukasi tentang demokrasi, keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, berbangsa dan bernegara serta cinta Tanah Air

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pengembangan wilayah Jawa Tengah Tahun 2021 ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata melalui keterpaduan, integrasi dan sinergi lokasi rencana program / kegiatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Poros pengembangan Utara-Utara dikembangkan untuk memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah diantaranya dengan Pengembangan KEK Kendal; Pembangunan KI Brebes; Optimalisasi kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas dan pembangunan Kendal *Sea Port*, Reaktivasi jalur rel kereta api strategis; Pengembangan Bandara Ngloram dan Dewandaru; Peningkatan jalan strategis dan pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan rel KA (FO Ganevo); serta Pengembangan angkutan umum massal.
- b. Poros pengembangan Selatan-Selatan dipercepat untuk meningkatkan kesejajaran perkonomian dengan wilayah Utara, diantaranya dengan Reaktivasi jalur KA strategis: Pembangunan Bandara JB. Soedirman Purbalingga (lanjutan); Pengembangan angkutan umum massal; Pembangunan / pengembangan simpul transportasi antar moda; Pembangunan infrastruktur strategis ( diantaranya Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan / JJLS); dan dukungan terhadap pembangunan kawasan industri baru.
- c. Poros pengembangan Utara-Selatan dimaksudkan untuk meningkatkan keseimbangan dan mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah diantaranya dengan peningkatan frekuensi layanan KA Komuter Kedungsepur dan Joglosemarkerto (Kereta Api *Loop*) dan reaktivasi jalur KA strategis.

- d. Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet – Sindoro – Sumbing – Merbabu – Merapi - Lawu.
- e. Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K).

Selain arah pembangunan wilayah, provinsi juga menetapkan Rancangan Dukungan kabupaten / kota terhadap pencapaian target sasaran makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Untuk Kabupaten Blora, ditetapkan target untuk angka PE sebesar 6,3-6,8 ( diproyeksi karena covid 19 menjadi 2-4); Angka Kemiskinan menjadi 9,26-10,26 ( diproyeksi karena covid menjadi 12-14 ), TPT sebesar 2,65-2,80 (diproyeksi karena covid 19 menjadi 3-4) dan IPM sebesar 68, 54

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan proyeksi karena pandemi covid 19 yaitu:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78 %
- c. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,05 %-8,05 % menjadi 11,94-11,02 %
- d. Indeks Gini sebesar 0,33-0,35 menjadi 0,365
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,23 % menjadi 5,23%
- f. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,8 - 6,3 % menjadi 3,8-4,8%
- g. Inflasi pada angka 3,0±1
- h. PDRB per kapita sebesar Rp 41,15 juta menjadi Rp.41,86 juta
- i. Indeks Williamson sebesar 0,58 menjadi 0,595
- j. Nilai Tukar Petani 104 menjadi 103
- k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,5 menjadi 72,49
- l. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02

#### **4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah meliputi

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal, diharapkan dapat memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang dihasilkan/didapatkan pada saat melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah.

Pokok pikiran Dewan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 , diantaranya berkaitan dengan, :

1. Pembangunan infrastruktur yang merata di Kabupaten Blora dengan mengintegrasikan pembangunan di kawasan perkotaan dan perdesaan, sehingga pembangunan tidak hanya terfokus pada kawasan perkotaan saja;
2. Peningkatan sarana dan prasarana bidang jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapinya seperti drainase dan penerangan jalan, bidang pariwisata, bidang kepemudaaan, bidang kesehatan seperti puskesmas pembantu, bidang pendidikan seperti sekolah, bidang perdagangan seperti pasar dan kios pedagang, dan bidang keagamaan seperti masjid dan pondok pesantren;
3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian seperti alat-alat pertanian, bantuan bibit tanaman dan ternak;
4. Peningkatan sarana dan prasarana desa seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, jembatan, air bersih, jalan pertanian, kantor desa, pagar makam, dan bangunan pengaman jalan;
5. Koordinasi dan penyelenggaraan pameran investasi;
6. Kondusivitas iklim politik yang sehat untuk menjalankan pemerintah yang lebih baik; dan

#### **4.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora**

Kabupaten Blora tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dengan tujuan “Mewujudkan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”. Arah kebijakan ini tentunya harus dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Blora yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu isu penting pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 layanan dasar SPM berkaitan Pemerintah Kabupaten yaitu: SPM pendidikan, SPM kesehatan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan SPM sosial.

2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Isu kemiskinan masih menjadi hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora karena angka kemiskinan secara komparatif dan relatif masih di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah dan rata-rata Nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Blora pada bulan September 2019 tercatat sebesar 11,32 % atau 97,860 juta jiwa penduduk miskin dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,96 % karena dampak dari pandemi covid-19 .

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora pada tahun 2019 berada pada 68,65 dan mengalami kenaikan sebesar 68,84 pada Tahun 2020, namun masih berada dibawah IPM nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Nilai tersebut terdiri atas angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita.

4. Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif

Total nilai investasi Kabupaten Blora pada tahun 2018 mencapai Rp 4,7 Triliun dan 2019 mencapai Rp 5,3 Triliun dan naik menjadi 6,9 T pada Tahun 2020, dengan investor PMA sebanyak 9 dan PMDN sebanyak 589. Jika dibandingkan dengan target kinerja dalam RPJMD maka telah mencapai target. Namun demikian, investasi dunia usaha dalam skala dan penyerapan tenaga kerja dinilai masih berjalan secara stagnan jika dibandingkan dengan daerah tetangga yang menjadi lokasi investasi swasta dalam skala



besar. Bahkan dengan situasi yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha akibat pandemi covid-19, banyak tenaga kerja yang dirumahkan/PHK dan pengusaha/investor yang mulai terancam gulung tikar.

5. Masih Rendahnya Pemerataan Pelayanan Infrastruktur

Perkembangan wilayah Kabupaten Blora masih dirasakan belum merata khususnya di wilayah Blora bagian selatan. Untuk itu, pembukaan akses dan pemerataan infrastruktur menjadi perhatian penting dengan tetap menjaga pertumbuhan dan kualitas infrastruktur di kawasan perkotaan. Salah satu indikator rendahnya pelayanan infrastruktur yakni kondisi jalan kabupaten dimana pada tahun 2019 baru sekitar 48,12 % jalan kondisi baik dari total 1.210,84 km panjang jalan yang ada, namun turun menjadi 29,6% pada Tahun 2020 karena adanya penambahan ruas jalan dan masih perlu upaya keras dengan target akhir RPJMD di tahun 2021 sebesar 65 %. Selain itu, kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 43,51 % dari target tahun 2021 sebesar 50,03 %.

6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang berjalan saat ini masih perlu banyak pembenahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora pada tahun 2018 memperoleh nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKjIP yaitu masih di kategori B meskipun secara kuantitatif naik. Belum optimalnya indeks profesionalisme ASN dalam manajemen ASN, penataan kelembagaan sesuai kewenangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik dan perlunya perubahan metode pencapaian target kinerja pemda secara lebih efektif dan efisien sebagai antisipasi dampak bencana nasional Covid-19 pada tahun 2021.

Dalam rangka mencapai sasaran makro pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021 yang mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19 dari target RPJMD Tahun 2016-2021, dan Rencana Target Tahun 2022 ( Sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026), sebagai berikut :

**Tabel IV.2**  
**Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Blora**  
**Akibat Pandemi Covid -19 Tahun 2021 dan**  
**Rencana Target Tahun 2022**

No	Indikator Makro	Target RPJMD 2016-2021	Proyeksi Capaian Target Tahun 2021*)	Proyeksi Target Tahun 2022**)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4-5,7	1 – 1,5 %	2 - 4
2	Tingkat Kemiskinan	9 – 10 %	11 – 12 %	11,4
3	Angka Pengangguran Terbuka	3,4 %	5 %	5,5
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,84	68,84	69,24

Sumber : \*) Proyeksi Bappeda, data terolah Tahun 2021, \*\*) Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026

.Dalam Pencapaian target prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021 disamping memperhatikan isu strategis juga memperhatikan target capaian pembangunan sampai triwulan II Tahun 2021, adapun permasalahan pembangunan sesuai capaian target triwulan II Tahun 2021 ditampilkan dalam tabel berikut :

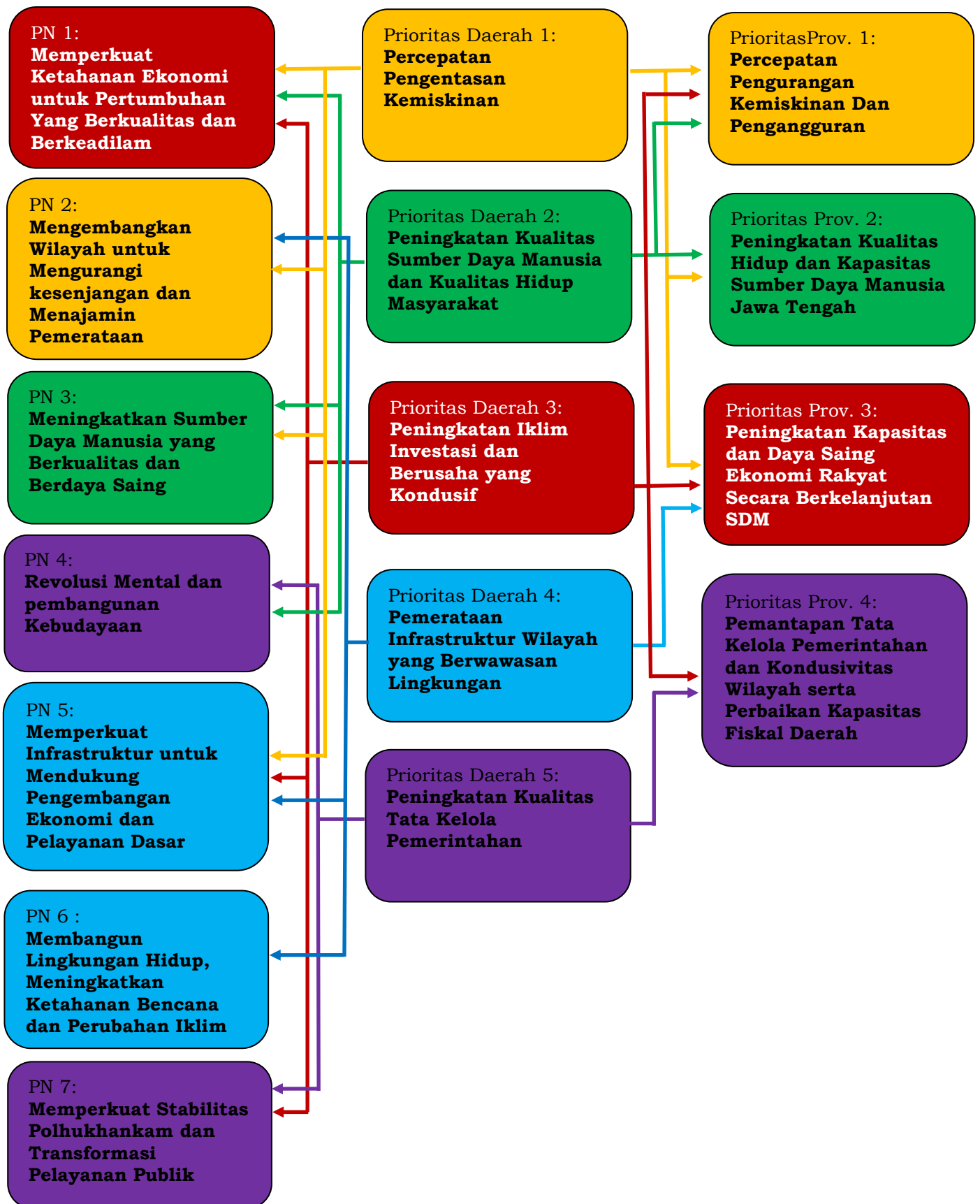
**Tabel IV-3**  
**Permasalahan Pembangunan Sesuai Capaian Indikator**  
**Pembangunan Sampai Triwulan 2 Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Status Capaian	Keterangan
1	Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi	Perlu Usaha Keras	
2	Masih rendahnya Cakupan Kunjungan ibu hamil K4	Perlu Usaha Keras	
3	Masih rendahnya Rasio dokter umum per satuan penduduk	Perlu Usaha Keras	
4	Masih rendahnya Cakupan pemeriksaan pada anak usia dini	Perlu Usaha Keras	
5	Masih rendahnya Persentase penduduk yang mendapatkan pemeriksaan obesitas 15 tahun	Perlu Usaha Keras	

6	Masih tingginya rata-rata kematian di RSUD	Perlu Usaha Keras	
7	Masih rendahnya Persentase jalan dalam kondisi baik	Perlu Usaha Keras	
8	Masih rendahnya Cakupan penegakan PERDA	Perlu Usaha Keras	
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di kabupaten	Perlu Usaha Keras	
10	Masih rendahnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Perlu Usaha Keras	
11	Masih rendahnya Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Perlu Usaha Keras	
12	Masih rendahnya Persentase <i>focal point</i> aktif	Perlu Usaha Keras	
13	Masih rendahnya Pemantauan uji kualitas udara	Perlu Usaha Keras	
14	Masih rendahnya Pemantauan uji kualitas limbah cair	Perlu Usaha Keras	
15	Masih rendahnya Persentase sampah yang terangkut	Perlu Usaha Keras	
16	Masih rendahnya Jumlah posyantek aktif	Perlu Usaha Keras	
17	Masih rendahnya Persentase aparatur desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	Perlu Usaha Keras	
18	Masih rendahnya Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	Perlu Usaha Keras	
22	Masih rendahnya Persentase koperasi aktif	Perlu Usaha Keras	
23	Masih rendahnya Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Perlu Usaha Keras	
24	Masih rendahnya Jumlah pemuda berprestasi	Perlu Usaha Keras	
25	Masih rendahnya Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Perlu Usaha Keras	
26	Masih rendahnya Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Perlu Usaha Keras	
27	Masih rendahnya Jumlah Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Perlu Usaha Keras	
28	Masih rendahnya Cakupan kajian seni	Perlu Usaha Keras	
29	Masih rendahnya Cakupan fasilitasi seni	Perlu Usaha Keras	
30	Masih rendahnya Cakupan gelar seni	Perlu Usaha Keras	
31	Masih rendahnya Cakupan sumber daya manusia kesenian	Perlu Usaha Keras	
32	Masih rendahnya Jumlah bahan pustaka yang sudah diselamatkan / dilestarikan	Perlu Usaha Keras	
33	Masih rendahnya Jumlah arsip / dokumen yang telah di duplikat dalam bentuk informatika	Perlu Usaha Keras	
34	Masih rendahnya Jumlah dokumen / arsip yang terpelihara dengan baik	Perlu Usaha Keras	
35	Masih rendahnya Produksi perikanan budidaya	Perlu Usaha Keras	
36	Masih rendahnya Produksi perikanan tangkap	Perlu Usaha Keras	
37	Masih rendahnya Jumlah kunjungan wisata	Perlu Usaha Keras	
38	Masih rendahnya Jumlah promosi produk unggulan pertanian /perkebunan	Perlu Usaha Keras	
39	Kurangnya produksi Kedelai	Perlu Usaha Keras	

<b>40</b>	Masih rendahnya Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan	Perlu Usaha Keras	
<b>41</b>	Kurangnya pelaksanaannya rakor dan monitoring di SKPD	Perlu Usaha Keras	
<b>42</b>	Masih rendahnya Jumlah ranperda inisiatif yang disahkan menjadi perda inisiatif	Perlu Usaha Keras	
<b>43</b>	Masih rendahnya Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Perlu Usaha Keras	

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2021, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Keterkaitan antara prioritas nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2021 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021 dapat dilihat dalam Gambar IV-1 berikut:



**Gambar IV – 1**

**Keterkaitan Prioritas pada RPJMN, RKPD Propinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021**

